

# DARI BIMBINGAN DAN KONSELING PERKEMBANGAN KE KOMPREHENSIF

(Refleksi 21 Tahun Mengawal Perjalanan Bimbingan dan Konseling di Indonesia, 1996-2017)



Disarikan oleh

**Sunaryo Kartadinata**

*Profesor Ilmu Pendidikan bidang Bimbingan dan Konseling*

*Ketua Umum Pengurus Besar ABKIN 2001-2005 dan 2005-2009*

**DEPARTEMEN PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
2017**

## **Ikhtisar**

Ketentuan mutakhir tentang layanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan di Indonesia tertuang dalam Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah, beserta Pedoman Penyelenggaraan sebagaimana termaktub dalam lampiran Permendikbud dimaksud. Turunan dari Permendikbud yang disebutkan dituangkan dalam Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling, yang populer disebut dengan POP BK, untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Dua puluh satu tahun perjalanan telah berlalu untuk sampai kepada kondisi dan posisi seperti saat ini, dan akan harus berlanjut terus untuk mengokohkan jati diri professional bimbingan dan konseling dalam dinamika tantangan dan peluang yang dihadapi. Permendikbud dan POP BK yang disebutkan menegaskan sebutan bimbingan dan konseling komprehensif sebagai sebutan yang digunakan.

Tanpa bermaksud berlebihan, pemikiran lahirnya bimbingan perkembangan dan kemudian pada saat ini populer dengan sebutan bimbingan dan konseling komprehensif, lahir dari kampus ini Universitas Pendidikan Indonesia (dh IKIP Bandung ketika itu) pada tahun 1996 yang diawali dengan sebuah riset yang disponsori Direktorat Jenderal Pendidikan Dikti melalui program hibah University Research for Graduate Education (URGE) yang dilaksanakan untuk selama tiga tahun (1996-1999).

Riset yang bertema *Quality Improvement and Management Systems Development of School Guidance and Counseling Services*, dipimpin oleh Sunaryo Kartadinata yang didampingi para Profesor Bimbingan dan Konseling yaitu Profesor Djawad Dahlan (alm), Profesor Rochman Natawidjaya (alm), Professor Mukhiar Suradinata (alm), dan Professor Maman Abdurachman (alm). Riset ini wajib melibatkan mahasiswa program doktor dengan tujuan memfasilitasi para calon doktor melakukan riset untuk penulisan disertasi dalam rangka penyelesaian pendidikan doktor. Mahasiswa program doktor yang terlibat adalah Ahman, Juntika Nurihsan, Syamsu Yusuf (UPI/IKIP Bandung), Dwi Yuwono (UNES/IKIP Semarang), dan Soeharto (UNS) sebagai *students research*. Kelima mahasiswa yang disebutkan pada saat ini sudah menjadi Profesor Bimbingan dan Konseling di universitas masing-masing.

Riset ini menghasilkan konsep penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, termasuk perguruan tinggi, yang berorientasi perkembangan yang disebut dengan Bimbingan dan Konseling Perkembangan (BKP) yang menegaskan empat komponen di dalamnya, yaitu layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Sampai saat ini BKP menjadi mata kuliah wajib pada program Sarjana Bimbingan dan Konseling di UPI. Di Amerika Serikat bimbingan dan konseling perkembangan mulai muncul pada dasawarsa 60-an.

Hasil riset tiga tahun pertama dilanjutkan dengan tiga tahun berikutnya (2000-2003) melalui hibah Riset Unggulan Terpadu (RUT) yang disponsori Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mengambil tema: *Pengembangan Inventori dan Analisa Tugas-tugas Perkembangan Untuk Penataan Sistem Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Riset dipimpin oleh Profesor Sunaryo Kartadinata dengan anggota tim Dr. Ahman, Dr. Juntika Nurihsan, Dr. Syamsu Yusuf, dan Drs. Karno To, M.Pd.(alm). Riset ini menghasilkan tiga temuan besar yaitu: (1) kubus perkembangan kemandirian, (2) standar kompetensi kemandirian, (3) Inventori Tugas Perkembangan (ITP) dan Analisis Tugas Perkembangan (ATP). Pada tahun 2014 ITP dan ATP memperoleh HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dari Kemenkumham.

## **Perjalanan BK Perkembangan: Sebuah pendekatan komprehensif**

Keberadaan layanan BK dalam pendidikan di Indonesia bukanlah hal baru. Layanan BK telah dimulai pada tahun 60-an. Secara formal terstruktur layanan BK dimulai dengan lahirnya Kurikulum 75 yang pada saat itu sebutannya Bimbingan dan Penyuluhan. Keberadaan BKP/BKK bukan berarti meniadakan sistem yang telah berjalan selama 25 tahun melainkan menata sistem yang telah ada sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan temuan riset.

Riset hibah URGE menghasilkan konsep bimbingan dan konseling perkembangan. Perkembangan dalam bimbingan dan konseling adalah sebagai pendekatan, yang berarti bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan lebih tinggi dalam ragam aspek perkembangan. Pendekatan perkembangan adalah pendekatan ke empat setelah pendekatan krisis, remedial, dan preventif. Ketiga

pendekatan pertama yang disebutkan lebih menekankan kepada kondisi-kondisi dan masalah sesaat yang dihadapi individu, sedangkan pendekatan perkembangan menyangkut proses dan ragam aspek perkembangan secara berkelanjutan dalam konteks lingkungan dimana individu berkembang. Bimbingan dan konseling perkembangan merupakan pendekatan yang komprehensif, oleh karena itu disebut Bimbingan dan Konseling Komprehensif (BKK). Jadi sebutan BKK sesungguhnya adalah BKP sebagai sebuah pendekatan yang komprehensif. BKP disebut BKK karena BKP sebagai sebuah pendekatan menyangkut landasan filosofis dan asumsi, ragam tahapan dan aspek perkembangan, sistem peluncuran (*delivery systems*), kolaborasi diantara personel sekolah sebagai tim, sistem manajemen dan akuntabilitas. Dalam jalur dan setting pendidikan formal proses perkembangan bisa diterjemahkan ke dalam jenjang pendidikan (TK s.d PT). Dapat ditegaskan bahwa BKP dan BKK tidak dipandang sebagai dua pendekatan yang berbeda, melainkan ibarat dua sisi mata uang, sisi yang satu merupakan orientasi sedangkan sisi yang lainnya merupakan strategi.

Terdapat perbedaan kerangka pikir dalam merumuskan layanan antara BKP/BKK dengan pola bimbingan dan konseling sebelumnya yang berorientasi pada *American School Counseling Association (ASCA)*. ASCA menggolongkan layanan bimbingan dan konseling ke dalam layanan: (1) pengumpulan data, (2) informasi, (3) konseling, (4) penempatan, (5) evaluasi dan tindak lanjut. Sedangkan BKP/BKK menggolongkan jenis layanan yang juga menjadi komponen program ke dalam layanan: (1) dasar, (2) responsif, (3) perencanaan individual dan (4) dukungan sistem.

Perjalanan riset selama enam tahun (1996-1999) dan (2000-2003) menghasilkan dua perangkat hasil yang membangun keutuhan pemikiran tentang bimbingan dan konseling. Hasil pertama adalah pemikiran konseptual tentang bimbingan dan konseling perkembangan dan hasil kedua adalah rumusan Kompetensi Kemandirian Peserta Didik dan perangkat instrument serta sistem analisis berbasis komputer yang disebut dengan ITP dan ATP. Kedua perangkat hasil ini secara bertahap didesiminasi dan mulai menjadi landasan praktek penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Pada tahun 2006 terjadi perubahan kurikulum, yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menempatkan bimbingan dan konseling dalam konsep dan

posisi yang tidak tepat, yakni sebagai bagian dari Pengembangan Diri yang membuat eksistensi dan posisi BK menjadi tidak jelas dan ditarik ke dalam payung pembelajaran.

Langkah responsif dan proaktif secara tegas diambil oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling (ABKIN) dengan menyelenggarakan Rakernas ABKIN pada tahun 2007 dan berkoordinasi dengan Dirjen Dikti dan Dirjen PMPTK. Langkah ini menegaskan filosofi, eksistensi dan posisi bimbingan dan konseling dalam pendidikan dan mengangkat bimbingan dan konseling perkembangan sebagai pendekatan komprehensif dalam pendidikan. Keutuhan pemikiran dari langkah ini tertuang dalam buku *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*, yang disahkan oleh Dirjen Dikti dan Dirjen PMPTK pada tahun 2007. Di masyarakat bimbingan dan konseling buku dimaksud dikenal dengan sebutan **BUKU BIRU**.

Perubahan Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013 kembali membuka celah untuk menegaskan eksistensi bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Dengan tetap konsisten kepada pemikiran yang terkandung dalam *buku biru*. Masyarakat bimbingan dan konseling Indonesia yang terdiri atas berbagai unsur kembali mengambil langkah untuk meyakinkan pengambil kebijakan akan perlunya penataan regulasi tentang bimbingan dan konseling. Hasil dari langkah ini terbit Permendikbud No. 111 tahun 2014 sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, yang menegaskan konsep dan sebutan bimbingan dan konseling komprehensif sebagai pendekatan yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling di dalam pendidikan. Dalam Permendikbud ini ditegaskan pula tentang perlunya layanan BK di sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Guru BK Profesional/Konselor.

Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 sebagai payung hukum eksistensi dan layanan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia masih memerlukan penjabaran ke dalam panduan yang lebih operasional. Untuk tujuan dimaksud masyarakat bimbingan dan konseling Indonesia kembali meyakinkan pengambil kebijakan akan pentingnya panduan dimaksud, dan disusunlah Panduan Operasional Bimbingan dan Konseling, atas dukungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), yang terbit pada tahun 2016. Di masyarakat bimbingan dan konseling panduan yang disebutkan terkenal dengan sebutan POP BK, yang terdiri atas POP BK untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Sepanjang tahun 2017

sosialisasi POP BK terus bergulir yang banyak diinisiasi oleh masyarakat BK itu sendiri. Pada saat ini POP BK sudah tersosialisasi hampir ke seluruh pelosok tanah air dan dapat diakses di [hsbki.or.id](http://hsbki.or.id)

### ***Terkait Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)***

Dalam implementasi kebijakan nasional tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter, bimbingan dan konseling kembali menegaskan diri dalam optimalisasi peran BK di dalam implementasi PPK. Konsep yang ditegaskan tetap konsisten pada konsep bimbingan dan konseling komprehensif. Penegasan diri ini memerlukan pengembangan dan pengawalan di dalam implementasi. Dalam konteks PPK, guru BK masuk kelas menjadi sebuah keniscayaan namun tetap harus mengedepankan strategi intervensi bimbingan dan konseling dan tidak terjebak pada pendekatan pembelajaran seperti mengajar sebuah mata pelajaran.

### ***Terkait Pendidikan Profesi(nal) Konselor (PPK)***

Payung hukum PPK tertuang dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAK). Rumusan kompetensi konselor dimaksud tertera dalam buku biru dengan penyesuaian struktur sesuai dengan UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Kini muncul persoalan baru yang harus kembali dikawal, yakni dengan lahirnya Kepmenristekdikti Nomor 157 Tahun 2017 tentang nomenklatur nama pendidikan profesi konselor yang dipadankan ke dalam Bahasa Inggris dengan sebutan *Counselor Profession Education* yang diperhadapkan dengan nomenklatur Pendidikan Profesi Guru BK/Konselor (PPGBK/K) sebagai nomenklatur yang berimplikasi pada pembayaran tunjangan profesi guru (BK). Sebutan guru bimbingan dan konseling dan sebutan konselor memerlukan sinergi payung hukum.

## Tantangan dan Orientasi ke depan

1. Pada era paska globalisasi kebenaran keilmuan tidak lagi berdasarkan narasi universal (*grand narrative*) tapi berdasarkan narasi kontekstual yang digali secara mendalam dari ragam nilai kultural. Pengembangan kesadaran kultural manusia sebagai warga negara dan warga dunia menjadi bagian dari kecakapan manusia yang dikembangkan melalui upaya bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berfungsi mengembangkan ragam aspek perkembangan dan kecakapan manusia untuk mencapai kesejahteraan lahir bathin yang hakiki.
2. Bimbingan dan konseling perkembangan/komprehensif perlu didukung oleh teori-teori kontekstual yang dikembangkan atas dasar nilai-nilai kultural dimana peserta didik atau konseli hidup dan berkembang.
3. Kehidupan peserta didik pada saat ini berada pada era digital yang ditandai dengan kemudahan akses informasi, perilaku instan, dan pragmatisme. Bimbingan dan konseling tetap beranjak dari pemahaman individu secara mendalam, dan dalam konteks era digital bimbingan dan konseling perlu mengembangkan konsep, teori dan teknik pemahaman individu generasi digital.
4. Inovasi dan kreativitas dalam bimbingan dan konseling harus dikembangkan dalam dua sisi. Pertama, inovasi dan kreativitas dalam layanan bimbingan dan konseling. Kedua, sebagai proses memfasilitas pengembangan perilaku kreatif dan inovatif konseli. Inovasi dan kreativitas bukan dalam arti mengalihkan wujud layanan BK ke dalam perangkat teknologi melainkan membangun teori dan keilmuan bimbingan dan konseling yang melahirkan pendekatan, metode dan teknik kontekstual bimbingan dan konseling, dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk bekerja. Inovasi dan kreativitas dalam bimbingan dan konseling harus dikembangkan mulai dari landasan filosofis dan keilmuan bimbingan dan konseling.
5. Di atas semua hal yang disebutkan proses perkembangan manusia dan proses membantu manusia untuk berkembang mesti sejalan dengan hakikat manusia dan tujuan hidup manusia yang digariskan oleh ajaran agama yang datang dari Allah swt.

Tantangan dan orientasi yang digambarkan merupakan persoalan yang harus dijelaskan dan dijawab melalui pemikiran filosofis dan riset yang akan menjadi landasan bagi pendidikan konselor, dalam hal pengembangan kompetensi dan jati diri profesi, program pendidikan konselor, tenaga pendidik konselor, sistem evaluasi pendidikan konselor, dan kelembagaan pendidikan konselor.

Bandung, 12 Rabiul Awwal 1439 H

1 Desember 2017